

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Review Peneliti Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Fajar Nur dkk (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta. Analisis data yang dilakukan menggunakan pengujian model regresi dengan uji asumsi klasik kemudian pengujian hipotesis. Hasil analisis data yang didapatkan menunjukkan secara parsial variabel kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan variabel pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara simultan kedua variabel diatas, yakni pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Surakarta.

Dalam penelitian Kamila, Ichwanul (2010) meneliti tentang Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta. Analisis data yang dilakukan meliputi uji asumsi klasik terdiri dari normalitas data, autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta

pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi, begitu pula untuk pemeriksaan pajak dan perubahan Penghasilan Kena Pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto, Yudi dkk (2014) meneliti tentang Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2013). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *explanatory (explanatory research)* dengan pendekatan kuantitatif. Data sekunder yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dokumentasi dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian, jumlah wajib pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan badan. Secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan badan, variabel jumlah wajib pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan badan.

Soraya & Dadang (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Intensitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kuningan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis statistic yang meliputi uji asumsi klasik dan analisis regresi moderating. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan pajak, intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap interaksi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kuningan.

Marisa & Agus (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi linear berganda dan data diproses dengan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Secara parsial dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negative, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadinya sendiri. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan. (Pohan, 2014:125)

Menurut Norman D. Nowak (zain, 2003:31) dalam buku Pohan (2014:126) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Menurut Devano dan Rahayu (2006:110) kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakan. Kepatuhan terdiri dari 2 macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal merupakan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan material merupakan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan serta juga meliputi kepatuhan formal.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan formal merupakan kepatuhan yang dapat dilihat dari para wajib pajak dalam penyampaian SPT dan pembayaran pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk kepatuhan material sendiri merupakan kepatuhan yang dapat dilihat dari bagaimana para wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya contohnya pajak penghasilan pasal 25 atau pajak penghasilan pasal 29 maupun pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain yaitu pajak penghasilan 21, 22, dan 23).

1.1 Persyaratan Wajib Pajak dengan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pohan dalam Sri Putri Utami (2017) Persyaratan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu menurut pasal 17C ayat (2) Undang-undang KUP dan Per-Menkeu No. 74/PMK.03/2012, sebagai berikut:

1. Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan secara tepat waktu
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan Keuangan diaudit atau diperiksa oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo, (2013:31) menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak. SPT Masa PPh meliputi SPT Masa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 15, dan Pasal 4 ayat 2.

2.1.2 Fungsi SPT

Bagi Wajib Pajak Penghasilan SPT mempunyai fungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
- c. Harta dan kewajiban, dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3 Surat Setoran Pajak (SSP)

3.1 Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut pasal 1 ayat (14) Undang-undang No. 28 Tahun 2008, “Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

3.2 Fungsi SSP

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. (Mardiasmo, 2013:37)

4. Pemeriksaan Pajak

4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan pengertian pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak juga dapat dilakukan untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh wajib pajak atas dasar *self assessment system*. *Self assessment* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Waluyo, 2003). Proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam SPT. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT disini digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya

terutang. Pemeriksaan pajak dilakukan agar target penerimaan pajak dapat diperoleh secara maksimal. Sehingga pemeriksaan pajak dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Indikator yang digunakan untuk pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

4.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo, (2011:67) tujuan pemeriksaan pajak yang dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, ‘Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sejak 1 Februari 2013 berlaku peraturan baru tentang tata cara pemeriksaan pajak yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013. Tata cara adalah aturan formal pemeriksaan pajak atau bisa disebut prosedur standar. Tujuan pemeriksaan ada dua, yaitu:

1. Menguji kepatuhan, yaitu pemeriksaan yang akan berujung pada penetapan pajak terutang. Hasilnya berupa: SKPKB, SKPLB, SKPN, dan STP.
2. Tujuan lain, yaitu pemeriksaan yang berujung rekomendasi atau pendapat pemeriksa.

4.3 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

4.4 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Adapun pengertian SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) timbul sebagai akibat pemeriksaan pajak oleh kantor pajak. Hak wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterimanya adalah: Mengajukan Keberatan, Mengajukan Pengurangan Sanksi Administrasi, Mengajukan Penundaan Pembayaran, dan Mengajukan Angsuran Pembayaran.

Dalam SKPKB akan diterbitkan ketika Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak

yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan Pasal 13A UU KUP.

4.5 Pengertian Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Adapun fungsi dari SKPLB adalah sebagai sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

4.6 Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan sebagai berikut: (Waluyo, 2011:68)

1. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan)

bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

3. Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain.
4. Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

4.7 Tahapan Pemeriksaan

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pemeriksaan, sebagai berikut: (Waluyo, 2012:379)

1. Persiapan Pemeriksaan

Untuk mempersiapkan pemeriksaan berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Untuk mempersiapkan pemeriksaan berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan:

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan
 - b. Melakukan penilaian atas pengendalian internal
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu)
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa
 - g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*)
- ## 3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Sebagai hasil pemeriksaan, penyusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak yang dilakukan pada akhir pemeriksaan pajak.

5. Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut John Hutagol (2007:325) adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak menurut direktorat jenderal pajak Indonesia, yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Bea Materai (BM)
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
5. Bea Perolehan Hak Tanah atau Bangunan (BPHTB)

5.1 Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya wajib membayar pajak ke kas negara.

5.1.1 Jenis-jenis Pajak Penghasilan

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan naman dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 menurut Undang-Undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak Penghasilan ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21.

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 28 adalah PPh kurang bayar yang tercantum adalah SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh 21, 22, 23, dan seterusnya) dan PPh Pasal 25.

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan dengan sistem pembayaran angsuran.

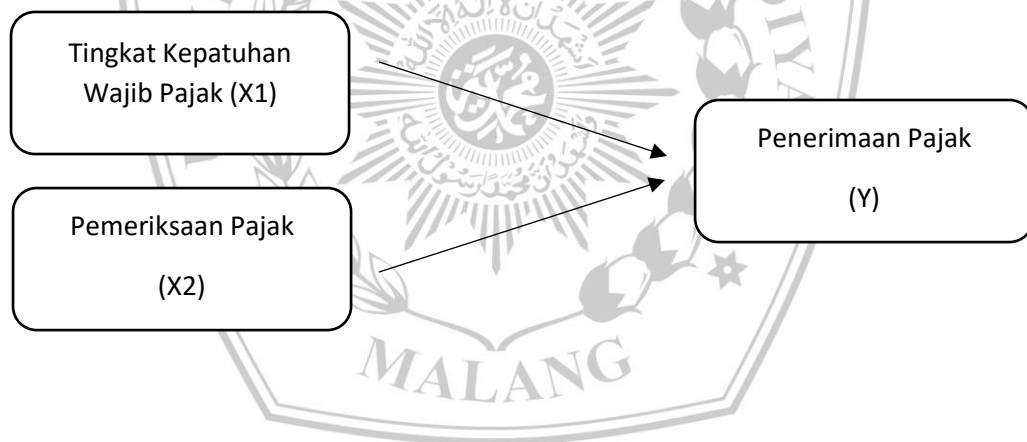
6. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang diedarkan dari produsen ke konsumen.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah pemahaman dan penganalisaan masalah yang dihadapi dalam penyusunan penelitian ini, maka diperlukan kerangka pemikiran guna memberikan gambaran dalam mencapai suatu kesimpulan penelitian.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah:



D. Hipotesis

1. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Rahayu (2010:138), Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peningkatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Nur Fajar dkk (2014) menunjukkan secara parsial variabel kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan badan. Menurut Widodo (2010:67) menjelaskan hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak yaitu, Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula. Di dukung pula penelitian oleh Soraya, Ida dkk (2015) yakni tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Dan Kamila, Ichwanul (2010) hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak berupa pelaporan SPT dan SSP ke KPP dapat meningkatkan penerimaan pajak. Jika para wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

maka dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007, menjelaskan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun, dan mengolah data serta keterangan dan bukti lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) Pengertian pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak akan dilakukan ketika terjadi SPT mengalami lebih bayar ataupun kurang bayar, SPT tidak atau terlambat disampaikan, atau adanya wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dan wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dan lain-lain. Hasil yang diperoleh setelah adanya pemeriksaan pajak tidak selalu berujung pada pajak terutang, akan tetapi

bisa jadi lebih bayar. Hasil pemeriksaan berupa surat ketetapan pajak kurang bayar ataupun surat ketetapan pajak lebih bayar bahkan surat ketetapan pajak nihil.

Hasil penelitian Paranoan, Laura Evalina (2015) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Namun, dalam hal ini pengaruh pemeriksaan pajak atas SPTLB akan mengurangi penerimaan pajak di KPP Madya Malang, karena adanya restitusi yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Di dukung pula penelitian oleh Rahmawati, Nur Fajar dkk (2014) yakni pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak peghasilan badan. Akan tetapi hasil penelitian Soraya, Ida dkk (2015) intensitas pemeriksaan pajak bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara intensitas pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak, semakin meningkat intensitas pemeriksaan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak dan begitu pula sebaliknya. Begitu pula penelitian oleh Marisa & Agus (2013) hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak disini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerimaan pajak akan bertambah jika WP dalam penyampaian SPT mengalami kurang bayar setelah dilakukannya pemeriksaan pajak sehingga WP wajib untuk membayarkan kekurangan pajak sesuai dengan yang sebenarnya sampai dinyatakan nihil. Dalam pemeriksaan pajak yang diberikan dapat

berpengaruh baik terhadap penerimaan pajak, karena dapat menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sehingga semakin baik pemeriksaan pajak cenderung dapat menurunkan penerimaan pajak. Maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

